

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya manusia ketika diciptakan secara berpasangan (laki-laki dan perempuan) untuk hidup berdampingan. Secara alamiah, manusia juga merupakan makhluk sosial yang ditandai dengan cara hidupnya yang saling bergantung dengan sesamanya. Pada aspek kedudukan, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan, namun perbedaan ini bukan pada akhirnya merendahkan salah satu pihak.¹ Lebih lanjut dalam perkembangannya, perbedaan tersebut menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena pembagian wilayah peran yaitu peran publik dan peran domestik. Di mana peran publik merupakan wilayah aktualisasi dari laki-laki, sedangkan wilayah domestik merupakan dunia perempuan² berakibat pada munculnya ketidakadilan gender.

Ketidakadilan tersebut akhirnya memunculkan gerakan kesetaraan dan keadilan gender yang berdampak pada kesempatan perempuan dapat mengaktualisasikan diri dalam ranah publik, contohnya dalam bidang politik atau pemerintahan. Walaupun dalam praktisnya, terdapat dua sisi yang berlawanan yaitu kendala dan peluang. Kendala mengacu adanya halangan tertentu dalam mewujudkan hak-hak politik perempuan dalam jabatan politik, sedangkan peluang menyiratkan akan

¹ Geovani Milthre Saragih, Yoga Triwanda, & Zainal Akmal, "Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau," *Jurnal Industri Perkotaan (JIP)* 27 (17): 24. Tersedia <https://jip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIP/article/download/5832/pdf>; diakses 10 Januari 2023

² Mery Kolimon, *Misi Pemberdayaan Perspektif Teologi Feminis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 295.

adanya kesempatan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam jabatan publik.³ Di Indonesia, banyak perempuan telah diberikan kesempatan untuk ikut dalam kontestasi pemilihan pemimpin (Presiden, DPR, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota). Misalnya di tingkat nasional dan daerah, setiap partai politik diwajibkan untuk memenuhi standar kuota 30% perempuan dalam mengusung calon legislatif (DPR & DPRD).⁴ Di beberapa daerah, perempuan telah menjadi pemimpin baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi, bahkan di tingkat pusat sebagai anggota DPR RI. Kehadiran perempuan untuk mengisi jabatan dalam ranah publik membuatnya ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan politis untuk pembangunan dan kemaslahatan bangsa.

Dalam konteks Rote sendiri, pemerintahan kabupaten dipimpin oleh bupati perempuan yakni Paulina Haning-Bullu. Terpilihnya Haning-Bullu menerobos stereotip bahwa perempuan tergolong lemah dan mempunyai tugas pelengkap laki-laki, yang berasal dari budaya patriarki yang telah dihidupi dan diwariskan terus-menerus.⁵ Dalam wawancara dengan sebuah media *online*, bupati Haning-Bullu mengatakan bahwa adanya stigma yang berkembang bahwa perempuan tidak mempunyai kompetensi untuk berkarier ataupun berpartisipasi dalam ruang publik sangat

³ Agustinus Supriyanti, "Demokrasi dan Hak Politik Perempuan dalam Jabatan Publik," dalam *Demokrasi Pribumi Membangun Sistem Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal*, Peny. Bertolomeus Bolong dan Fredrick Y. A. Doeka (Kupang: Bonet Pinggupir, 2014), 146.

⁴ Bdk. UU RI No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁵ Tersedia dari <https://rotendao.victorynews.id/gaya-hidup/pr-3422895390/bupati-paulina-haning-bullu-balikan-stigma-perempuan-makhluk-lemah>; diakses tanggal 10 Januari 2023.

berdampak pada ketimpangan gender. Sebagai contoh, dulunya kepala daerah selalu melekat pada sosok laki-laki.⁶ Namun, saat ini telah terjadi perubahan karena perempuan telah diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum.

Ini menjadi bukti bahwa saat ini jabatan kepala daerah bukan hanya milik kaum laki-laki. Perempuan pun mempunyai kesempatan yang sama. Lebih lanjut dikatakan Haning-Bullu, dirinya menjadi bupati bukan untuk membangun persaingan dengan laki-laki. Namun dalam jabatan ini, ia ingin membuktikan bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin yang mengayomi dan memberikan pelayanan bermanfaat bagi masyarakat.⁷ Di sini, kehadiran perempuan sebagai pemimpin menunjukkan bahwa kaum perempuan juga mampu mengaktualisasikan dirinya dalam ruang publik.

Selain dalam bidang politik atau pemerintahan, dalam bidang agama secara khususnya gereja, perempuan telah menunjukkan eksistensinya sebagai pemimpin dalam hal ini menjadi pendeta. Di GMT⁸ misalnya, dari total jumlah keseluruhan pendeta sebanyak 1.516 orang, perempuan sebanyak 1.033 orang dan laki-laki 483 orang.⁹ Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam lembaga gereja di GMT.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Gereja Masehi Injili di Timor.

⁹ Tersedia dari <https://sinodegmit.or.id/ms-gmit-tabis-97-pendeta-total-pendeta-gmit-1-516-orang/>; diakses tanggal 20 Maret 2023.

Namun keadaan tersebut tidak berlaku dalam kehidupan sebagian masyarakat adat di Indonesia. Kesadaran akan kesetaraan laki-laki dan perempuan beserta gerakan adil gender masih terasa lebih sempit lingkungannya. Cara yang ditempuh oleh satu kelompok dalam menjalani hidup, dalam berpikir, merasakan, mengorganisasi kelompok, dan merayakan serta berbagi kehidupan masih sangat ditentukan oleh kaum laki-laki dengan norma dan aturan yang sulit diubah.¹⁰ Keadaan inilah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat di Rote, kedudukan perempuan dan laki-laki masih mengalami ketimpangan, terutama dalam kegiatan-kegiatan adat seperti yang nampak dalam musyawarah *leo*. Di mana ketimpangan ini pada akhirnya membatasi peran perempuan dalam ranah publik. Kiki Else Dorline Tulle dalam penelitiannya memberikan gambaran tentang pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam musyawarah adat *leo* di Rote. Laki-laki mempunyai hak penuh dalam ranah publik (urusan adat) serta perempuan berhubungan dengan dunia domestik (urusan konsumsi). Hanya laki-lakilah yang duduk bersama dalam musyawarah untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal adat, sedangkan perempuan berada di belakang untuk membicarakan keperluan konsumsi demi kelancaran acara adat.¹¹ Berdasarkan pengalaman penulis, perempuan biasanya diminta untuk berbicara

¹⁰ Asnat N. Natar (eds), *Perempuan Kristiani Indonesia Berteologi Feminis dalam Konteks* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), XI.

¹¹ Kiki Else Dorline Tulle, "Studi Tentang Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Leo di Kabupaten Rote Ndao," *Paradigma Jurnal Kajian Budaya* 6 (2016): 65 tersedia di <https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma>; diakses 18 Desember 2022.

keperluan-keperluan konsumsi dan aksesoris adat yang diperlukan setelah para laki-laki selesai membahas hal-hal yang berhubungan erat dengan urusan adat.

Setelah penulis mendalami apa faktor yang memengaruhinya, ternyata ada satu filosofi budaya yaitu “*tou mane no ina a’ana*” yang arti harafiahnya *tou mane* ialah laki-laki adalah raja/pemimpin yang mempunyai kuasa penuh untuk mempertahankan status sosial keluarga, serta arti harafiah dari *ina a’ana* ialah perempuan/isteri mempunyai tugas mengurus anak dan keluarga. Senada dengan itu, Paul Haning dalam bukunya menjelaskan secara harfiah tentang nilai budaya “*tou mane no ina a’ana*”, menurutnya, ungkapan “*tou mane no ina a’ana*” yang arti harafiahnya *tou mane* ialah laki-laki atau jantan, serta arti harafiah dari *ina a’ana* ialah perempuan dan/atau isteri adalah kanak-kanak.¹² Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa oleh karena laki-laki mempunyai fisik yang kuat maka ia bertugas melindungi dan mengayomi perempuan atau isteri serta pula menangani pekerjaan yang berat, sedangkan perempuan/isteri adalah kaum yang lemah dan bila mengalami suatu masalah, maka kadang-kadang bersifat kanak-kanak, misalnya mudah sekali mencururkan air mata seperti anak kecil. Jadi laki-laki bersifat ksatria dan punya tanggung jawab yang besar.¹³ Implikasi dari nilai budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan.

Menyadari besarnya pengaruh nilai budaya “*tou mane no ina a’ana*” dalam relasi antara laki-laki dan perempuan di Rote, secara khusus dalam hubungannya

¹² Paul A. Haning, *Rote Ndao Rangkaian Terselatan Zamrud Khatulistiwa (Tae Rote Feo Kale)* (Ende: Penerbit ARNOLDUS Ende, 2013), 232.

¹³ Ibid.

dengan peran dan tugas dalam musyawarah *leo*,¹⁴ maka penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih jauh tentang apa sebenarnya makna dan dampak dari nilai budaya “*tou mane no ina a’ana*” dalam kehidupan masyarakat Rote, secara khusus dalam musyawarah *leo* Mbau Leo.¹⁵ Oleh karena itu, penulis mengkaji dalam sebuah penelitian tesis dengan judul: **“TOU MANE NO INA A’ANA” (Kajian Teologi Feminis Terhadap Peran Perempuan Dalam Musyawarah Leo Mbau Leo Di Desa Busalangga Timur,¹⁶ Kecamatan Rote Barat Laut).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa makna nilai budaya “*tou mane no ina a’ana*” menurut pandangan masyarakat *leo* Mbau Leo ?
2. Bagaimana dampak “*tou mane no ina a’ana*” dalam hubungannya dengan peran perempuan dalam musyawarah *leo* Mbau Leo di Desa Busalangga Timur?
3. Bagaimanakah refleksi teologis berdasarkan teologi feminis terhadap peran perempuan *leo* Mbau Leo dalam dalam musyawarah *leo* ?

¹⁴ Kata *leo* berasal dari bahasa daerah Rote yang artinya sekumpulan orang yang berasal dari beberapa marga atau klan.

¹⁵ *Leo* Mbau Leo adalah salah satu *leo* yang mendiami wilayah eks *nusak* Dengka yang saat ini terdiri dari kecamatan Rote Barat Laut dan Laohalu di kabupaten Rote Ndao

¹⁶ Desa Busalangga Timur adalah salah satu desa di Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mendeskripsikan makna *tou mane no ina a'ana* berdasarkan perspektif masyarakat *leo* Mbau Leo.
2. Menganalisis dampak dari *tou mane no ina a'ana* dalam hubungannya dengan peran perempuan dan laki-laki dalam musyawarah *leo* Mbau Leo di desa Busalangga Timur.
3. Membuat refleksi teologis berdasarkan kajian teologi feminis berkenaan dengan peran perempuan dalam musyawarah *leo* Mbau Leo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Memberi sumbangsih pemikiran tentang makna dan dampak “*tou mane no ina a'ana*” dan keterkaitannya terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam musyawarah *leo*.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat adat dalam menentukan peran perempuan dalam musyawarah *leo*.
3. Sebagai sebuah kajian yang dapat dipelajari dan memberi sumbangan pemikiran bagi dunia akademisi dan nilai-nilai sosial budaya dalam lingkup *leo* di kabupaten Rote Ndao.

1.5 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan peran perempuan dalam beberapa aspek. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Kiki Else Dorlina Tulle melakukan penelitian dengan judul studi tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah *leo* di kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2016 dengan menggunakan metode kualitatif, fenomenologis, budaya dan gender. Tulle menggunakan metode fenomenologis untuk mengetahui persepsi beberapa *maneleo* tentang partisipasi perempuan dalam musyawarah Leo. Sedangkan metode kajian budaya dan gender digunakan untuk mengetahui posisi, peran, dan tugas perempuan dalam pandangan adat Rote. Hasil penelitian Tulle menunjukkan bahwa dalam beberapa musyawarah *leo*, perempuan diikutsertakan tetapi mereka akan berbicara ketika diminta, dan usul saran perempuan tidak harus didengar. Bahkan dalam keputusan terakhir berada di tangan laki-laki sebab perempuan tidak diberi ruang leluasa untuk keputusan-keputusan adat, laki-lakilah mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah *leo*.¹⁷ Namun hal yang menarik dari hasil penelitian terdapat fakta bahwa salah satu *leo* yaitu Leo Lulu ternyata telah menempatkan perempuan sebagai pengurus *leo*. Keterlibatan tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut-serta mempunyai posisi

¹⁷ Tulle, *Studi Tentang Partisipasi*, 55.

yang sama dalam musyawarah *leo*, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil mufakat antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam kepengurusan *leo*, laki-laki dan perempuan mengisi kepengurusan secara seimbang.

Berdasarkan penelitian ini terlihat adanya kompleksitas dinamika relasi pembagian kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Di satu sisi telah ada upaya untuk melibatkan perempuan di dalam proses pengambilan keputusan, tetapi secara umum tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan masih dilihat sebagai warga kelas dua yang belum diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan pada musyawarah *leo*.

2. Jemianus Klau Seran dan Setiati Widiastuiti melakukan penelitian dengan judul studi tentang keputusan adat dalam musyawarah suku Uma Hun di desa Naas, kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, NTT. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2022 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pada hukum adat yang berlaku di Suku Uma Hun. Hasil penelitian tersebut menunjukkan: (1) Mekanisme dalam pengambilan keputusan adat diawali dengan penyampaian informasi adat (*Lia Adat*) atau sengketa kepada *Mane Maksain* (tetua adat) serta mengundang hadir duduk di meja musyawarah (*Labis Leten*) Uma Hun. Tetua adat melakukan musyawarah adat bersama untuk mencari solusi. Para tetua adat dapat mengambil keputusan akhir secara sah dengan mengetuk meja (*Labis*) yang diputuskan oleh sesepuh atau orang yang dianggap paling tertua di Suku Uma Hun; (2) Peranan laki-laki

dapat disebut sebagai *Mane Maksain* atau sebutan lain *Labis Nain* artinya bahwa meja musyawarah merupakan tempat kekuasaannya laki-laki dalam melakukan musyawarah adat dan pengambilan keputusan. Sedangkan peranan perempuan hanya sebagai perempuan penjaga rumah atau biasa disebut sebagai *Feto Mahen Uma* yang hanya memiliki hak untuk duduk di dalam rumah (*Uma Laran*) dan di luar rumah (*Labis Kraik*) untuk mendengar hasil musyawarah tetua adat dan memberi saran atau masukan; (3) Peranan laki-laki lebih dominan karena hanya laki-laki yang dapat disebut sebagai *Mane Makoa Lia* artinya laki-laki pengambil keputusan. Jadi hanya laki-laki yang memiliki kekuasaan penuh (*full power*) untuk bertindak melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan akhir secara sah.¹⁸

Hasil penelitian ini tidak berbeda juga dengan hasil penelitian pertama bahwa memang laki-laki-laki yang mempunyai hak dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah Adat. Jika di Rote masih ada upaya untuk membagi kekuasaan, di mana perempuan dapat menduduki jabatan dalam kepengurusan adat, maka di Malaka hal tersebut tidak berlaku.

3. Yuliana Julia Mon dan Antonius Nesi, melakukan penelitian dengan judul citra perempuan dalam dongeng-dongeng daerah NTT. Penelitian berlangsung bulan

¹⁸ Jemianus Klau Seran dan Setiati Widiastuti, "Studi tentang pengambilan keputusan adat dalam musyawarah suku Uma Hun," *E-Journal Students – E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, Vol 11, No 12 (2022): 148 tersedia <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/view/18017/17330>, diakses tanggal 18 Desember 2022.

Pebruari 2020 dengan menggunakan metode studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dongeng-dongeng NTT teridentifikasi 4 (empat) citra tokoh perempuan, yakni: (1) citra perempuan yang berkaitan dengan dirinya sendiri; (2) citra perempuan yang berkaitan dengan laki-laki; (3) citra perempuan yang berkaitan perempuan lainnya; (4) citra perempuan yang berkaitan dengan masyarakat. Dari keempat citra itu diidentifikasi pula karakter tokoh perempuan dalam dongeng- dongeng NTT, yakni mereka adalah pribadi mandiri, pekerja keras, pemberani, memiliki keahlian/keterampilan tertentu, pribadi spiritual (makhluk religius), dan mampu melakukan kekerasan. Tokoh perempuan dalam dongeng- dongeng NTT juga memiliki citra tidak ingin dijajah secara seksual atau mandiri dalam memilih pasangan, takhluk pada saudara laki-laki, dan lemah dan mudah memaafkan orang lain. Di sisi lain, mereka juga digambarkan berkarakter bermusuhan, berselisih, merebut suami orang lain, memiliki rasa empati, bersikap kesatria dan rela berkorban, serta ingin mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat.¹⁹

Hasil penelitian tersebut memberikan penggambaran bahwa dalam cerita-cerita dongeng di NTT terdapat kisah para perempuan tangguh sekaligus lemah ketika berhadapan dengan laki-laki. Di sisi lain, mereka juga mampu menunjukkan

¹⁹ Yuliana Julia Mon dan Antonius Nesi, "Citra Perempuan dalam dongeng-dongeng Daerah NTT," *Jurnal Pustaka* Vol XX, No.1 (2020): 20, <https://doi.org/10.24843/PJIIB.2020.v20.i01.p02> diakses 18 Desember 2022

sikap solidaritas dan soliditas dalam membangun relasi dengan sesamanya baik laki-laki maupun perempuan.

4. Lidwina Inge Nurtjahyo melakukan penelitian dengan judul partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di dewan adat terkait dengan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan: kisah dari Atambua, Sumba Timur, Rote dan Labuan Bajo. Penelitian ini berlangsung dari tahun 2015-2018 dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian literatur, observasi partisipatif, dan wawancara. Hasil penelitian Nurtjahyo menunjukkan bahwa dalam musyawarah adat berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus kekerasan di empat daerah tersebut tidak melibatkan perempuan. Setiap keputusan merupakan hak para laki-laki (tua-tua adat).²⁰

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa dalam musyawarah adat berkaitan dengan penyelesaian konflik kekerasan, perempuan tidak dilibatkan. Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian Jemianus Klau Seran dan Setiati Widiastuiti di suku Uma Hun, Malaka, di mana hanya laki-laki yang boleh duduk dalam forum musyawarah untuk membicarakan sekaligus mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah termasuk dalam penyelesaian konflik kekerasan.

²⁰ Lidwina Inge Nurtjahyo, "Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan di Dewan Adat terkait dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Kisah dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Bajo," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020): 108, doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2485>, diakses 18 Desember 2022.

5. Voni Yandri Malelak melakukan penelitian dengan judul strategi adaptasi perempuan terhadap peningkatan sosio-ekonomi keluarga di desa Lakamola kecamatan Rote Timur, kabupaten Rote Ndao. Penelitian berlangsung pada tahun 2021 dengan menggunakan metode kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian Malelak menunjukkan bahwa peran perempuan di desa Lakamola sangat strategis dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga pada masa krisis. Mereka mampu memainkan peran ganda untuk fungsi produksi dan reproduksi. Dengan menggunakan strategi sosial dan ekonomi ketika hasil pertanian tidak efektif diwujudkan dengan membuka lapangan pekerjaan baru seperti usaha kios, menjual aneka kue dan pangan lokal, berjualan ikan, dan lain-lain. selain itu, mereka juga mampu menekan pengeluaran ekonomi rumah sehingga dengan pendapatan yang minim dapat memenuhi kebutuhan keluarga.²¹

Hasil penelitian tersebut memberi bukti bahwa perempuan Rote (desa Lakamola) mampu menunjukkan peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan juga menunjukkan karyanya di ruang publik dengan cara berjualan aneka makanan demi memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.

²¹ Voni Yandri Malelak, "Strategi Adaptasi Perempuan terhadap Peningkatan Sosio-ekonomi Keluarga di Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao," *Jurnal Deo Muri* 1, no.2 (2021) tersedia dari <https://ejurnal.unasdem.ac.id/index.php/ejunasdem/article/view/39>, diakses 23 Juni 2023.

6. Ira Desiawanti Mangililo melakukan penelitian dengan judul teologi perempuan dan pengimajinasian ulang komunitas inklusif di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Penelitian ini berlangsung pada tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dengan metode kajian teologi feminis. Hasil penelitian Mangililo menunjukkan bahwa perempuan GMIT terus berjuang untuk mengembangkan kapasitas sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan kemiskinan dan keterbelakangan yang membelenggu hidup mereka saat ini.²²

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian dari Malelak yang menjelaskan bahwa perempuan GMIT tetap menunjukkan eksistensinya untuk memperjuangkan dan merawat kehidupan keluarga dan masyarakat.

7. Mariska Lauterboom melakukan penelitian dengan judul keadilan humanis bagi pembebasan perempuan Indonesia: suatu pendekatan feminis. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan feminis. Hasil penelitian Lauterboom membuktikan bahwa prinsip-prinsip keadilan humanis dapat diterapkan dalam konteks hidup bersama. Sebab keadilan humanis memperlakukan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan dalam kepenuhan kemanusiaannya.²³

²² Ira Desiawanti Mangililo, "Teologi Perempuan dan Pengimajinasian ulang Komunitas Inklusif di Gereja Masehi Injili di Timor", *Jurnal: Kurios* Vol 8, No 1 (2022): 225 , DOI: <https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.160>, diakses 18 Mei 2023.

²³ Mariska Lauterboom, "Keadilan Humanis bagi Pembebasan Perempuan Indonesia: Suatu Pendekatan Feminis", *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, Vol III, No 1 (2016):5 tersedia dari [https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/10436?issue=Vol%203,%20No%201%20\(2016\)](https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/10436?issue=Vol%203,%20No%201%20(2016)) diakses 24 April 2023.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan humanis. Hal ini bertujuan agar terciptanya relasi yang saling memberdayakan antara laki-laki dan perempuan.

8. Irene Umbu Lolo melakukan penelitian dengan judul menyuarakan keadilan bagi perempuan penenun, berteologi dari konteks Sumba. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2016 dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian Lolo menjelaskan bahwa tindakan plagiarisme kain tenun dan pengingkaran pengalaman penenun adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, terutama dari segi etika dan hukum. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat, termasuk institusi pemerintah dan gereja, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan bagi para penenun di Sumba.²⁴

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan perkembangan industri tekstil yang ditandai dengan cara meniru motif dari kain tenun lokal berdampak bagi ketidakadilan pada perempuan Sumba. Hasil tiruan dari industri tekstil dihargai dengan harga yang murah berakibat pada kurangnya peminat pada hasil tenunan asli dari para perempuan Sumba. Keadaannya ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bersama, baik intitusi pemerintah dan gereja.

²⁴ Irene Umbu Lolo, "Menyuarakan Keadilan bagi Perempuan Penenun, Berteologi dari Konteks Sumba," dalam *Perdamaian dan Keadilan dalam Kontes Indonesia yang Multikultural dan Beragam Tradisi Iman*, Yusak B. Setiawan, dkk (eds.) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 177-78.

9. Asnath N. Natar melakukan penelitian dengan judul perempuan dalam kepemimpinan agama: pengalaman Kristen. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian literatur. Hasil penelitian Natar menjelaskan tantangan terbesar yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan adalah agama dan budaya. Agama dan budaya yang patriarki ini juga didukung dengan konsep politik yang patriarki, feodalistis dan berwarna maskulin, di mana kekuasaan politik ada pada laki-laki, yang akan mengambil keputusan baik di dalam rumah maupun di luar rumah.²⁵ Dengan demikian membatasi peran perempuan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa walaupun dalam beberapa kesempatan perempuan telah berhasil menjadi pemimpin, namun hal itu bukan berarti bahwa tidak ada lagi ketidakadilan bagi perempuan. Oleh karena perjuangan kesetaraan dan keadilan gender perlu dilakukan terus-menerus.

10. Buce A. Ranboki melakukan penelitian dengan judul perempuan penyembuh: suatu pendekatan feminis. Penelitian ini berlangsung tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan feminis. Hasil penelitian Ranboki menjelaskan bahwa di Timor praktek penyembuhan tradisional para perempuan penyembuh (*mnene*) dituding sebagai perdukunan oleh gereja. Tuduhan ini memarginalkan dan melukai martabat perempuan. Oleh karena itu, menurutnya gereja perlu

²⁵ Asnath N. Natar, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kriteen", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, No 2 (2019): 133, tersedia dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/182.133-147> diakses 27 Mei 2023.

membangun sebuah teologi yang benar-benar lahir dan berpihak pada perempuan, sembari merengkuh para penyembuh ke dalam ruang keramahtamahan gereja untuk berdialog, bermitra, dan memberdayakan.²⁶

Hasil penelitian membuktikan bahwa seringkali gereja melakukan ketidakadilan bagi warganya seperti yang nyata dalam perlakuan gereja bagi para perempuan penyembuh di Timor. Oleh karena itu, ke depan gereja perlu membangun dialog yang konstruktif dengan nilai-nilai dalam budaya lokal yang diyakini oleh para perempuan penyembuh. Dengan demikian, gereja dapat menentukan sikap yang berdasarkan keadilan bagi perempuan.

1.6 Keaslian Penelitian

Hasil penelitian terdahulu menguraikan tentang posisi dan peran perempuan dalam masyarakat pada konteks dan keadaan mereka masing-masing. Dari sepuluh penelitian-penelitian tersebut tergambar jelas bahwa perempuan mampu menunjukkan eksistensinya baik di ranah domestik dan publik meskipun selalu ada tantangan yang dihadapi. Berdasarkan sepuluh penelitian tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Adapun hal-hal yang berbeda adalah lokus penelitian, yaitu di *leo* Mbau Leo yang berada di Desa Busalangga Timur, dan yang menjadi perhatian adalah mendalami tentang konsep *Tou Mane No ina A'ana* terhadap peran perempuan dalam musyarah *leo*.

²⁶ Buce A. Ranboki, "Perempuan Penyembuh: suatu Pendekatan Feminis," *Indonesian Journal of Theology* 6 no.2 (2018): 163-64, doi <https://doi.org/10.46567/ijt.v6i2.11> diakses 25 Juni 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dibuat sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ringkasan penelitian terdahulu, keaslian penelitian, sistematika penulisan dan kerangka berpikir.

Bab II : Landasan Teori.

Bab ini berisi pemaparan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Ada empat teori yang digunakan yakni teori teologi feminis, teori budaya patriarki, teori pembagian kerja dalam masyarakat Rote, dan teori kepemimpinan perempuan.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, narasumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisa

Bab ini berisi gambaran umum desa Busalangga Timur, sistem kekerabatan, hasil penelitian tentang makna *tou mane no ina a'ana* dan dampaknya terhadap peran perempuan dalam musyawarah *leo*, dan analisa hasil penelitian

Bab V : Refleksi Teologis

Bab ini berisi refleksi teologis tentang peran dan kepemimpinan perempuan.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan sara

1.8 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai alur dalam menentukan arah dari penelitian yang dikerjakan.

